

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka, penulis mengemukakan beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka bertujuan memberikan gambaran perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis dan data-data yang ada setidaknya memberikan gambaran awal kondisi yang berkaitan dengan tema peneliti. Oleh karena itu dibawah ini akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai rujukan pembeda antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Temuan dan Kesimpulan
1.	Titin Purwaningsih dan Valina Singka Subekti, 2017	Political Family and Intra-Party Democracy in Indonesia. (A Study on the Political Recruitment of the Golkar Party during the Reform Era in South Sulawesi)	Banyak keluarga politik dalam Partai Golkar Sulawesi Selatan karena mekanisme rekrutmen yang bersifat oligarki-meritokratik. Adanya pewarisan aktifitas social, politik dan pewarisan konstituen memberikan peluang yang lebih besar bagi keluarga politik dalam rekrutmen politik. Selain itu, institusionalisasi yang masih lemah yang bergantung kepada actor politik/elite politik di satu sisi, dan adanya faksionalisasi dalam organisasi partai yang mengakibatkan mundurnya pengurus partai beraklibat pada semakin kuatnya keluarga politik. Lebih dari 50% suara yang diperoleh oleh Anggota DPRD Sulawesi Selatan pada pemilu 2014 berasal dari keluarga politik.
2.	Muhammad Sopian, dkk, 2017.	Rekrutmen Politik Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia	Partai PDI-P Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecenderunganpartisan. Terlihat dalam mekanisme skoring yang digunakan pada kriteria yang dimiliki oleh kader internal seperti perjuangan sejarah partai, posisi struktural di partai, sejarah pelatihan yang pernah diikuti, dan keaktifan kader. Selain itu, juga

No	Peneliti	Judul Penelitian	Temuan dan Kesimpulan
		Perjuangan)	mempertimbangkan kecenderungan <i>compartmentalization</i> dan <i>survival</i> meskipun tidak begitu dominan. Secara umum dalam sistem penilaian yang digunakan untuk menetapkan calon legislatifnya, berisi kriteria-kriteria yang cenderung menguntungkan calon internal, meskipun secara rekrutmen yang dilakukan Partai PDI-P Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka.
3.	Resta Konitirani, dkk, 2017.	Upaya PDIP dalam Memenuhi Kuota Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Penetapan Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Dewan Pimpinan Cabang PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Kota Surakarta)	Upaya PDI Perjuangan dalam memenuhi kuota 30% calon legislatif perempuan adalah dengan mengkoordinasikan setiap tingkat kepengurusan untuk merekrut caleg perempuan sebanyak mungkin, melakukan kaderisasi anggota perempuan berupa pendidikan politik dan menempatkan kader perempuan dalam struktur kepengurusan partai serta dalam biro perempuan, melakukan sosialisasi kepada para kader perempuan dan pengurus serta masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan perempuan di bidang legislatif. Upaya selanjutnya adalah dengan mengembangkan karir politik kader perempuan guna mempersiapkan dan melatih mental para kader perempuan, rekrut caleg perempuan yang berkualitas sehingga dapat mewakili berbagai aspirasi masyarakat, dan mendampingi para caleg perempuan dalam melakukan proses kampanye berupa pengenalan caleg perempuan kepada masyarakat dan mengkoordinasikan agar proses kampanye yang berjalan dapat seimbang dan tidak terjadi benturan.
4.	Ahmad Riyadh U.B, dkk, 2015.	Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Di Kabupaten Sidoarjo	Model rekrutmen calon anggota legislatif partai politik di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan model rekrutmen politik dari kolaborasi Model Rekrutmen antara lain model Barber, Snowiss, Rush & Althoff dkk. Dimulai dengan sosialisasi pendaftaran, seleksi, setelah itu dilakukan dengan penetapan calon anggota legislatif oleh tim Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai politik di Kabupaten Sidoarjo dan di beri nomor urut sesuai dengan kriteria ketua umum partai politik dan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). Selanjutnya, di daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo untuk di tetapkan menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg) tetap dengan nomor urutnya.
5.	Muhammad Fathul Mubin, 2014.	Studi tentang Strategi Pemenangan Tim Sukses Hanafi Rais dalam Pemilihan Legislatif di Indonesia Tahun 2014.	Hanafi Rais dan tim suksesnyamenerapkan strategi mobilisasi massa baik melalui jaringan internal PAN maupuneksternal PAN. Di jaringan internal PAN, mobilisasi massa dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan mesin politik PAN dalam lingkup DPW sampai cabang ditingkat kecamatan seluruh Yogyakarta. Berbagai program dan kegiatan sosialisasipolitik dan kampanye menjelang Pemilu Legislatif 2014 dilakukan sesuai denganjadwal dan fasilitasi dari DPW, DPD dan DPC PAN. Sementara itu, di jaringaneksternal PAN, mobilisasi massa

No	Peneliti	Judul Penelitian	Temuan dan Kesimpulan
			<p>dilakukan dengan mengoptimalkan peran media massa baik berbentuk tulisan di media cetak dan online maupun melalui program pertunjukan seni Pangkur Jenggleng TVRI, jejaring organisasi sosial-keagamaan Muhammadiyah, afiliasi politik anggota Aisyiah, simpatisan kalangan nahdliyin, maupun warga masyarakat umum melalui program penyediaan gerobak sampah dorong berlabel 'Hanafi Rais Center'. Selain itu, Hanafi Rais dan tim suksesnya juga menerapkan strategi ketokohan, baik melalui pencitraan diri dari Hanafi Rais maupun memanfaatkan ketokohan Amien Rais.</p>
6.	Cholida Eka Anggraini, dkk, 2014.	Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus Pdp Dan Pks Kota Surakarta	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan; 1) Strategi komunikasi politik. Komunikasi internal dalam PDI Perjuangan dan PKS Kota Surakarta dengan dilakukan dengan rapat inti pengurus sebagai bentuk komunikasi ke atas. Penyebaran informasi kebijakan-kebijakan partai hingga ke tingkat paling rendah dalam tatanan struktur kepartaian melalui koordinasi di tiap-tiap wilayah sebagai bentuk komunikasi ke bawah. 2) Strategi Komunikasi politik eksternal partai politik dengan masyarakat menggunakan program-program yang dikeluarkan oleh partai. PDI Perjuangan melalui program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). 3) Dalam proses rekrutmen calon legislatif PDI Perjuangan dilakukan penelitian yang berupa penilaian, survei dan riset kelayakan bagi tiap-tiap calon yang diajukan oleh masyarakat. Calon legislatif terpilih melalui pertimbangan dari pengabdian anggota kepada partai.</p>
7.	Khoiri, 2014.	Strategi Politik PDI-P dalam Pilkada Yogyakarta 2011	<p>Kesimpulannya, kemenangan PDI-P dari metode strategi politik berupa komunikasi politik yang efektif, baik terhadap masyarakat, pihak keraton dan simpatisan partai itu sendiri. PDI-P menggunakan komunikasi politik yang kompleks, sisi verbalitas, non verbal serta simbol bahkan paduan keduanya.</p>
8.	Allan Yanika, 2014.	Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional Provinsi Riau Periode 2014-2019	<p>Pola rekrutmen calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Riau Periode 2014-2019 bahwa pendaftaran bakal calon anggota legislatif tidak hanya dikhususkan bagi kader saja, namun juga terbuka untuk masyarakat umum dengan persyaratan lolos verifikasi internal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PAN. Sesuai dengan hasil Kongres Nasional Partai Amanat Nasional tahun 2010, disepakati dibentuknya sebuah Komite yang bertugas khusus dalam proses pemenangan Partai Amanat Nasional didalam pemilu tahun 2014.</p>
9.	Kaswan Try Poetra, 2013.	Perbandingan Rekrutmen PDI-P dan Partai Demokrat terhadap CALEG	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan pola rekrutmen PDI-P dan Partai Demokrat terhadap caleg DPRD pemilu tahun 2014 di Kab. Polewali Mandar hampir sama, dimana pola rekrutmen yang diterapkan kedua</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Temuan dan Kesimpulan
		DPRD PEMILU 2014 di Kabupaten Polewali Mandar	partai ini dimulai dari pendaftaran bakal calon legislatif, Seleksi tahap I (Seleksi Berkas) dan Seleksi tahap II yang dilakukan oleh DPP masing-masing partai. Dalam merekrut caleg, PDI-P dan Partai Demokrat juga lebih memprioritaskan kader internal partainya namun tidak menutup kemungkinan PDI-P dan Partai Demokrat untuk merekrut caleg dari pihak eksternal partai.
10.	Teguh Adi Prasojo, 2013.	Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019	Partai Golkar memiliki kriteria sendiri yang harus dimiliki oleh kader/ Caleg berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, adapun kriteria tersebut adalah: a) Memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif; b) Memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar; c) Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT); dan d) Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Dalam rangka menentukan Daftar Calon Anggota Legislatif dilakukan penilaian terhadap kader bakal calon anggota Legislatif meliputi aspek: (a) Pengabdian, (b) elektabilitas, (c) penugasan sebagai fungsionaris dan, (d) pendidikan.
11.	Ishaq, dkk,2013	Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Dpc Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat Pada Pemilu 2014	Pola rekrutmen calon anggota legislatif oleh DPC Partai Demokrat di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat menggunakan pola rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen terbuka terdapat dua mekanisme: Pertama, merekrut calon anggota legislatif di internal partai. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi kadernya yang menjadi pengurus di partai untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif. Kedua, merekrut calon anggota legislatif di eksternal partai. Dalam mekanisme ini, Partai Demokrat mengakomodasi non kader partai untuk direkrut sebagai calon anggota legislatif, seperti tokoh masyarakat dan para simpatisan. Namun dalam sistem rekrutmen Partai Demokrat belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dengan masih adanya masalah-masalah yang terjadi dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif.
12.	Muhammad Imam Akbar Hairri, 2012.	Demokrasi Internal Partai: Studi Proses Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Golkar Tahun (1998. 2004 dan 2009)	Temuan dilapangan memperlihatkan bahwa terpilihnya Akbar Tandjung pada Munaslub 1998 disebabkan figurinya sebagai politisi sipil yang telah lama berkiprah di dalam Golkar serta tekanan reformasi yang anti-militer dan anti-soeharto, dukungan Ormas HMI, dukungan pengusaha kaya dan juga posisinya sebagai Mensesneg. Terpilihnya Jusuf Kalla pada Munas 2004 disebabkan pengaruh kekuasaan sebagai Wapres 2004-2009 dan latar belakang sosial sebagai seorang pengusaha kaya.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Temuan dan Kesimpulan
			Sedangkan terpilihnya Aburizal bakrie pada Munas 2009 disebabkan pengaruh kekuasaan ppula sebagai Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat kabinet SBY Jilid I, serta posisinya sebagai orang terkaya di Asia Tenggara tahun 2008 versi majalah Globe Asia.
13.	Wakhidatul Afifa, 2011.	Implementasi Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Semarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rekrutmen politik pada PDI-P Kabupaten Semarang mencakup rekrutmen anggota, rekrutmen pengurus, rekrutmen calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen anggota dilakukan dengan cara persuasif yang diawali dengan sosialisasi PDI-P kepada masyarakat untuk menampilkan eksistensi partai. Mekanisme pendaftaran anggota dimulai dengan calon anggota mendaftarkan diri sebagai anggota partai melalui jenjang struktural yang ada. Implementasi rekrutmen pengurus DPC dilakukan melalui Konfercab setiap lima tahun sekali. Perekrutan dimulai dengan memilih ketua DPC dari calon ketua yang namanya diusulkan oleh utusan anak cabang partai berdasarkan hasil rapat PAC. Ketua terpilih menjadi ketua formatur yang selanjutnya mempunyai wewenang untuk menyusun kepengurusan DPC.
14.	Budi Prayitno, 2009	Pelembagaan Politik PDIP JATENG	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan politik PDIP Jateng masih dalam derajat pelembagaan yang rendah. Kesimpulan ini diambil dari penaksiran terhadap hasil penelitian pada setiap parameter yang digunakan. Kondisi ini terjadi akibat dominannya porsi yang diambil DPP PDIP dalam menentukan segala keputusan politik di daerah. DPD PDIP Jateng sebagai kepanjangan tangan partai di daerah hanya diperankan sebagai objek penderita dari keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PDIP.

Sumber: Data diolah oleh penulis.

Dari Tabel 2.1 telah dijelaskan masing-masing penelitian terdahulu, dari marketing politik, strategi politik, sampai pada rekrutmen politik. Sehingga, sebagai perbedaan dengan penelitian rekrutmen politik sebelumnya, dalam penelitian ini akan difokuskan pada ***“Analisis Rekrutmen Politik dalam Mewujudkan Demokrasi Internal Partai” Studi Kasus: DPC PDI-P Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.***

## **2.2. Kerangka Teori**

### **2.2.1. Rekrutmen Politik**

#### **2.2.1.1. Rekrutmen Politik**

Salah satu ahli yang pernah memberikan penjelasan mengenai rekrutmen politik adalah Surbakti (1992:118) yang menyoroti rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Sedangkan, Mas'ood mengemukakan bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkn diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. (Mas'ood dalam Tangkilisan, 2003:188). Arti dari rekrutmen politik itu sendiri, merupakan sebuah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat difungsikan dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. (Gaffar, 1999: 155).

Menurut *Czudnowski* dalam Pamungkas, (2011:91) mengartikan rekrutmen politik sebagai proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Lebih jauh, Romli (2005:76) berpendapat dan menyebutkan dua hal, rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Lanjutnya, suatu rekrutmen dikatakan terbuka apabila seluruh warga negara tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan rekrutmen tertutup adalah proses

rekrutmen secara terbatas, yaitu hanya individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan.

Oleh karenanya, *Almond* dalam Romli (2005:78) mengartikan fungsi rekrutmen politik adalah sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan yang melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. Fungsi-fungsi ini dijalankan melalui pemunculan tokoh-tokoh partai untuk jabatan-jabatan public, dalam sistem otoritarian ia ditunjuk atau diangkat, sedangkan dalam sistem politik demokratis ia dipilih melalui pemilihan umum (Hamid, 2008:11).

Menurut Haris (2005:8), Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup:

1. Penjaringan calon. Tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut:

1. *Partisan*

Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai

2. *Compartmentalization*

Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang

3. *Immediate Survival*

Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut

4. *Civil Service Reform*

Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai. (Romli, 2005:93).

#### **2.2.1.2. Tahapan dalam Rekrutmen Politik**

Setelah pengertian dari rekrutmen politik, dan berdasarkan fungsinya yang sudah dijelaskan diatas. Selanjutnya, peneliti merincikan prosedur-prosedur, sifat dan mekanismedalam rekrutmen politik yang berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi dalam rekrutmen politik. Menurut *Almond* dan *Powell* (1988: 108) prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bentuk pelaksanaan, yaitu:

1. Prosedur tertutup (*Closed Recruitment Process*)

Adalah sistem rekrutmen partai yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif maupun pejabat eksekutif. Prosedur tertutup adalah rekrutmen yang dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh segelintir orang

2. Prosedur terbuka (*Open Recruitment Process*)

Adalah proses dimana nama-nama calon yang diajukan, diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi yang murni dan transparan. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan.

Hal lain dijelaskan Putra, (2003:209). Menyebutkan terdapat beberapa mekanisme dalam rekrutmen politik, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rekrutmen terbuka

Rekrutmen terbuka, yang mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini

memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

- a. Mekanismenya demokratis.
- b. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki.
- c. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi.
- d. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

## 2. Rekrutmen tertutup

Rekrutmen tertutup berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Selain itu, dikenal juga dengan sifat proses rekrutmen politik menurut *Sahid Gatara*(2007: 17) yaitu:

a) *Top-down*

Artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari atas atau orang-orang yang sedang menjabat. Contoh dari sifat ini adalah penunjukan pribadi dan seleksi pengangkatan.

b) *Bottom-up*

Artinya proses rekrutmen politik berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki jabatan. Contoh sifat ini adalah individu-individu melamar pada partai politik untuk maju sebagai kandidat anggota legislatif maupun calon kepala daerah.

c) *Bersifat campuran*

Artinya proses seleksi yang memadukan antara model *top-down* dan *bottom-up*. Contoh sifat ini adalah pada proses pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif maupun eksekutif.

Jadi, mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon legislatif, karena sistem pengangkatan calon legislatif tersebut

dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon legislatif yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum.

Maka dari itu, dari yang peneliti jelaskan diatas, mengenai definisi rekrutmen politik, kemudian tahapan rekrutmen politik, sampai pada prosedur dan sifatnya. Kecenderungan dalam penelitian ini akan lebih mendekati kepada Sifat dalam rekrutmen politik terhadap demokrasi internal partai. Dikarenakan tema penelitian ini lebih merujuk kepada sosok figur anggota legislatif, yang dimana juga merupakan ketua partai. Maka pendekatan pada sistem demokrasi pada internal partai lebih tepat untuk dilihat mengenai sifat proses rekrutmen politik di Partai PDI-P Kabupaten Musi Rawas seperti apa. Untuk itu, dalam rancangan penelitian peneliti rangkum masing-masing indikator yang akan digunakan pada penelitian di sub bab kerangka berpikir.

### **2.2.2. Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum, menurut Muhammad (2004: 29) adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Selain itu, Banyak para ahli yang menjelaskan tentang pengertian pemilu, seperti yang dikemukakan oleh Surbakti (1992:181), Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Sedangkan menurut Budiarjo, pemilihan umum adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat

dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan Negara.

Lebih lanjut *Maurice Duverger* dalam bukunya yang berjudul *I'Es Regimes des Politiques* menyatakan sebagai berikut: Cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang dimaksud demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat yang memilih seseorang atau partai politik dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas-tugas (kelembagaan) negara seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Menurut Kusnardi dan Ibrahim dalam jurnal Budiana (2009), secara umum sistem pemilu dibedakan atas dua macam yaitu sistem pemilu mekanis dan organis. Dalam sistem pemilu mekanis, rakyat di posisikan sebagai massa individu yang sama. Artinya rakyat dipandang sebagai individu yang mengendalikan pemilu melalui organisasi partai politik. Sedangkan sistem pemilu organis memandang rakyat sebagai individu yang merupakan bagian dari

persekutuan seperti persekutuan profesi, persekutuan geneologis, atau persekutuan lapisan sosial seperti buruh, tani, cendikiawan dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan pemilu perlu diketahui bahwa tujuan pemilu adalah:

- a. Untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat.
- b. Memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara (Nazarudin, 1993:43).

Jika Secara umum pemilihan umum merupakan sebuah proses pencerminan prinsip kedaulatan rakyat yaitu proses melalui rakyat memberikan mandat kepada orang-orang yang dipercaya untuk mengelola kehidupan politik, maka pemilihan umum harus menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk diwakili oleh orang-orang yang mereka pilih. Oleh karena itu, pemilihan umum harus menjamin prinsip keadilan, kejujuran, umum, bebas, kerahasiaan dan secara langsung (Darmastuti, 2004:48-50).

Nohlendalam Prihatmoko, (2008:93) mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.

Berdasarkan praktek pemilu yang sudah ada, Fatah (2000: 117) membagi pemilu menjadi dua tipe yakni:

1. Pemilu sebagai formalitas belaka

Pemilu yang dijadikan sebagai formalitas belaka adalah pemilu yang dilakukan dengan cara-cara tidak demokratis yang biasanya penuh dengan intervensi dan manipulasi, pemilu hanya dijadikan suatu formalitas politik yang sebenarnya bertujuan melanggengkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Hasil dari pemilu tersebut sudah dapat diketahui sebelum pemilu tersebut berlangsung.

2. Pemilu sebagai alat demokrasi

Pemilu sebagai alat demokrasi adalah sebuah pemilu yang dijalankan secara jujur, bersih, bebas, kompetitif dan adil.

### **2.2.3. Partai Politik: Konsep dan Fungsinya**

Salah satu sarana untuk berpartisipasi politik adalah Partai Politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan kekuasaan tersebut melakukan kebijakan-kebijakan mereka.(Condro,2012:2).

Di Indonesia partai politik diartikan sebagai suatu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Berdasarkan pengertian politik dan partai di atas, menurut Neumann dalam Maran (2007:85) definisi partai politik adalah Organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik aktif dalam suatu masyarakat, yang menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok lain atau dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dalam rangka memperoleh dukungan rakyat.

### **2.2.3.1. Fungsi Partai Politik**

Menurut Budiardjo (2002: 163–166) Partai politik modern menjalankan empat fungsi utama: sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik dan pengatur konflik. Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interest articulation*) atau “*political interests*” yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partai adalah yang menjadi struktur-antara atau “*intermediate structure*” yang harus memainkan peran dalam membunikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara. Fungsi ketiga

partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat (*conflict management*).

Seperti sudah disebut di atas, nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan (*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Dalam perspektif memahami partai politik, terdapat beberapa fungsi partai politik yang tak dapat dipisahkan. Dalton dan Wattenberg dalam Pamungkas (2011:15-20) membagi sejumlah fungsi partai menurut bagiannya yakni sebagai berikut:

1. Fungsi partai di elektorat.

Pada bagian fungsi partai ini menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat empat fungsi partai yang masuk dalam fungsi partai di elektorat yaitu:

- a. Menyederhanakan pilihan bagi pemilih.
- b. Pendidikan warga Negara.
- c. Membangkitkan simbol indentifikasi dan loyalitas.
- d. Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi.

## 2. Fungsi partai sebagai organisasi

Pada fungsi ini lebih melekatkan fungsi partai politik sebagai organisasi politik ataupun proses-proses yang terjadi dalam partai politik tersebut. Dalam fungsi ini tetdapat empat fungsi yakni:

- a. Sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan public.
- b. Pelatihan elit politik ataupun kaderisasi.
- c. Pengartikulasian kepentingan politik.
- d. Pengagregasian kepentingan politik.

## 3. Fungsi partai di pemerintahan

Pada fungsi ini partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan di pemerintah. Pada bagian ini terdapat 7 fungsi yakni:

- a. Menciptakan mayoritas pemerintahan.
- b. Pengorganisasian pemerintah.
- c. Implementasi tuntutan kebijakan.
- d. Mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi.
- e. Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah.
- f. Kontrol administrasi terhadap pemerintah.

g. Memperkuat stabilitas pemerintahan.

#### **2.2.4. Demokrasi Internal Partai**

Sudah bukan rahasia lagi bahwa di mata banyak pengamat asing, demokrasi Indonesia saat ini berada dalam tahap perkembangan yang positif dan layak diapresiasi. Pendapat ini merujuk beberapa realitas politik seperti pelaksanaan pemilu yang demikian banyak pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan akhirnya pada tingkat nasional, yang berlangsung relatif aman dan terkendali, tanpa menimbulkan gejolak atau kekerasan dan tidak membawa kekacauan.

Teori demokrasi internal partai politik digunakan untuk mengetahui syarat-syarat proses demokratisasi dapat berjalan dengan baik di dalam internal partai. Partai politik harus memenuhi syarat-syarat demokrasi internal yang baik disebabkan proses demokrasi di dalam partai dalam menjadi cerminan bagi proses demokrasi di dalam sistem politik suatu negara. Semakin sesuai dengan nilai-nilai yang tepat dalam menciptakan demokratisasi internal partai maka akan semakin baik bagi peranan partai politik dalam sistem politik negara.

Proses demokrasi internal partai adalah proses pemilihan seorang calon pimpinan Partai melalui penyerapan aspirasi seluruh kader-kader di tingkat akar rumput sehingga Ketua Umum yang terpilih merupakan aspirasi kader-kadernya (Alan Warre, 1996: 258).

Dengan demikian proses demokrasi internal partai adalah suatu cara untuk mendapatkan seorang pimpinan partai dengan menerapkan mekanisme pengambilan suara dukungan dari setiap kader di dalam partai sehingga pimpinan

partai yang terpilih mendapatkan legitimasi yang kuat untuk menjalankan fungsi sebagai seorang pimpinan tertinggi di dalam partainya. Akan tetapi yang menjadi persoalan di dalam penerapan demokrasi internal bagi Partai politik yang memiliki jumlah kader yang besar. *Alan Warre* memiliki 2 cara untuk dapat menerapkan mekanisme demokrasi di dalam pemilihan seorang Ketua Umum Partai yaitu mengatakan bahwa:

“untuk memperoleh kontrol/mekanisme demokrasi di dalam pemilihan kandidat (pada partai) yang memiliki jumlah anggota yang besar yaitu pertama dengan melakukan pertemuan tingkat lokal hingga ke pertemuan tingkat akhir (pusat) dimana setiap pandangan dari para anggota dari tingkat lokal masuk di dalam pertimbangan atau melalui mekanisme semua anggota hadir dan memilih secara langsung terhadap kandidat yang dicalonkan.

Namun sebuah proses demokrasi internal tidak benar-benar menjamin bahwa proses yang berlangsung benar-benar demokratis. Kemenangan seorang Ketua Umum sangat ditentukan oleh kekuatan yang dimilikinya seperti latar belakang profesinya seperti militer, pengusaha atau birokrat, memiliki dukungan massa, kemampuan finansial, kemampuan persuasif dan lain sebagainya. Masing-masing kekuatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para calon Ketua umum untuk dapat memenangkan suara para kadernya. Namun seringkali para kader mengutamakan pragmatisme politik seperti tawaran uang, jabatan dan insentif lainnya dengan menghilangkan pertimbangan penting seperti masa pengabdian seorang calon Ketua umum di dalam partai, loyalitas, pertimbangan moral dan lain sebagainya.

Oleh sebab itu pula menjadi sebuah isu yang krusial mengenai bagaimana cara terbaik untuk merekrut seseorang untuk menjadi sebuah Ketua Umum Partai atau dengan kata lain nilai-nilai apa saja yang harus menjadi landasan dan modal yang harus dimiliki seseorang untuk bisa menjadi Pimpinan sebuah partai politik. Allan Ware berpendapat bahwa:

“Hal yang paling utama yang harus dimiliki di dalam rekrutmen politik menyangkut pimpinan partai pada saat sekarang yaitu harus telah memiliki pengalaman yang lama sebagai seorang legislator, bekerja sebagai legislator partainya yang berada di parlemen menjadi jalan untuk tangga karir bagi seseorang untuk bisa naik menjadi seorang pimpinan partai”. (Allan Warre, 1996: 274)

Sehingga yang menjadi prasyarat penting untuk menjadi seorang Ketua Umum atau pimpinan sebuah partai adalah haruslah memiliki pengalaman dan pengabdian yang lama sebagai wakil partai di dalam parlemen. Dengan menjadi legislator di dalam parlemen merupakan tangga bagi seseorang untuk bisa menjadi pimpinan partai politik tersebut. Dapat dipahami bahwa yang ditekankan untuk seseorang dapat menjadi pimpinan partai haruslah dilihat dari lamanya seseorang menjalankan fungsi sebagai legislator partainya di dalam parlemen.

Teori demokrasi internal mengenai syarat ideal bagi seorang pimpinan partai politik dapat menjadi landasan analisis dengan melihat pada sosok figur Yudi terpilih sebagai Ketua Partai PDI-P Kabupaten Musi Rawas. Posisi Ketua Umum partai politik merupakan posisi yang strategis yang dapat mempengaruhi proses demokratisasi di Indonesia, khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Hal ini disebabkan posisi Ketua Umum Partai dapat menentukan

arah preferensi politik Partai Politik sekaligus menentukan arah kebijakan politik Partai terhadap Pemerintah. Kecakapan seorang pimpinan partai sangat diperlukan karena memiliki wewenang untuk mengontrol kader-kader partai yang duduk di Pemerintahan baik di lembaga legislatif maupun di birokrasi Pemerintahan. Terpilihnya seorang Ketua Umum Partai yang memiliki kemampuan untuk menjalankan visi dan misi partai sangat ditentukan oleh proses demokrasi internal partai.

Menurut Alan Warre (1996), Proses demokrasi internal partai adalah proses pemilihan seorang calon pimpinan partai melalui penyerapan aspirasi seluruh kader-kader di tingkat akar rumput/*grassroots*. Sehingga, Ketua Umum yang terpilih merupakan aspirasi kader-kadernya.

Dengan demikian proses demokrasi internal partai adalah suatu cara untuk mendapatkan seorang pimpinan partai dengan menerapkan mekanisme pengambilan suara dukungan dari setiap kader di dalam partai sehingga pimpinan partai yang terpilih mendapatkan legitimasi yang kuat untuk menjalankan fungsi sebagai seorang pimpinan tertinggi di dalam partainya (Akbar, 2012).

Demokrasi memang lebih dahulu muncul daripada partai politik, akan tetapi dalam sistem demokrasi modern keduanya tidak dapat dipisahkan. Bahkan sistem politik demokrasi tidak mungkin eksis tanpa partai politik dan sistem kepartaian. Partai politik dalam sistem politik demokrasi memiliki sejumlah peran:

- Merupakan instrumen suksesi kekuasaan melalui pemilihan umum (peralihan kekuasaan secara periodik dan tertib),

- Memobilisasi pendapat publik,
- Menjadi sarana bagi warga negara menyalurkan aspirasinya,
- Menjadi sarana partisipasi warga negara dalam proses politik dan konstitusional dan dalam melaksanakan hak sipil dan politik,
- Memediasi berbagai organisasi masyarakat sipil dengan lembaga negara,
- Memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan publik,
- Menawarkan calon pemimpin negara, dan
- Menawarkan koheisi dan disiplin dalam pemerintahan dan partai oposisi menuntut akuntabilitas pemerintah kepada parlemen dan rakyat. (The CAPF Bill Digest. 2007)

Karena partai politik merupakan salah satu aktor utama demokrasi, partai politik secara internal juga harus demokratis (intra-party democracy). Akan tetapi Robert Michels, yang dikenal sebagai teoritis tentang Iron Law of oligarchy, menyatakan bahwa organisasi politik yang berlingkup besar seperti partai politik, bahkan setiap organisasi besar, cenderung dikelola secara oligarkis yang lebih melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan organisasi (Robert Michel. 2001)

Berikut adalah penjelasan Michels mengapa setiap organisasi yang kompleks cenderung dikelola secara oligarkis. Organisasi yang pada awalnya idealistik dan demokratis kemudian didominasi oleh sekelompok kecil pemimpin yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan juga untuk mempertahankan jabatannya. Semua organisasi yang kompleks, termasuk partai politik cenderung dikelola secara oligarkis karena kegiatan sehari-hari organisasi

yang kompleks itu tidak mungkin dikelola oleh keanggotaan massal. Tidak mungkin memanggil massa anggota bersidang setiap kali partai politik hendak membuat keputusan. Pengambilan keputusan lebih dapat dilakukan oleh sekelompok kecil kalangan profesional yang penuh-waktu memimpin dan mengarahkan organisasi. Secara formal, pemimpin organisasi dipilih oleh dan akuntabel kepada para anggota. Akan tetapi dalam praktik, justru pemimpinlah yang mengontrol para anggota. Hal ini tidak lain karena para pemimpin itu memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola organisasi. Mereka mengendalikan sarana komunikasi dalam organisasi dan secara formal bertindak mewakili organisasi ke dalam dan keluar. Massa anggota mengalami kesulitan dalam mengkaunter kepemimpinan yang dipegang oleh mereka yang memiliki keahlian dan pengalaman. Sekelompok kecil pemimpin ini makin lama makin merasa tak tergoayahkan, bahkan merasa jauh lebih mampu daripada mereka yang seharusnya mereka layani. Bahkan mereka semakin lama semakin jauh dari massa anggota yang memilihnya. Ketidakmampuan para anggota ini lebih diperburuk oleh kecenderungan massa yang tergantung kepada pemimpin, yaitu kebutuhan psikologis massa untuk dipimpin.

Apakah dengan demikian tidak ada gunanya membahas demokratisasi internal partai politik? “The Iron Law of Oligarchy” sesungguhnya memberikan pesan bagi setiap organisasi yang hendak menghindari oligarki untuk mengambil sejumlah langkah pencegahan. Organisasi besar seperti partai politik itu harus menjamin agar para kader partai pada semua tingkatan organisasi dan para anggota tetap aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan partai.

Para pemimpin jangan diberi kewenangan absolut untuk mengelola partai secara sentralistik. Sepanjang tersedia saluran komunikasi terbuka antara para pemimpin dan pengurus dengan para kader dan anggota serta proses pembuatan keputusan dilakukan secara kolektif oleh para pemimpin, pengurus dan kader partai lainnya; kepemimpinan oligarkis akan sukar terbentuk.

Pandangan para ilmuwan politik tentang unsur atau faktor yang membuat demokrasi berfungsi dapat dipilah menjadi dua. Pertama diwakili oleh Sartori yang menilai kompetisi antar-partai politik lebih menentukan daripada demokrasi partai secara internal (Giovanni Sartori. 1976). Kedua, para ilmuwan politik yang menilai demokrasi partai secara internal sebagai faktor yang paling menentukan berfungsinya demokrasi dalam negara dan masyarakat. Para ilmuwan politik kelompok kedua ini sependapat tentang pentingnya demokratisasi partai politik secara internal, tetapi terdapat perbedaan dalam konseptualisasi dan indikator demokrasi partai secara internal. Sebagian memandang demokrasi partai lebih sebagai kemampuan partai dalam agregasi kepentingan, formulasi kebijakan publik, perekrutan kandidat yang memiliki kemampuan, dan mencerminkan aspirasi dan kepentingan publik (pemilih yang lebih luas) daripada partisipasi anggota dalam proses pembuatan keputusan, transparansi, dan pemilihan pengurus. Para ahli yang lain lebih mengedepankan keterlibatan para anggota dalam penentuan calon anggota DPR dan DPRD serta penentuan calon kepala pemerintahan, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Menurut Richard S. Katz, seleksi kandidat merupakan salah satu fungsi khas partai politik dalam demokrasi.

Hal ini tidak hanya karena seleksi kandidat untuk bersaing pada pemilihan umum merupakan salah satu fungsi yang membedakan partai politik dari organisasi lain yang mungkin berupaya mempengaruhi hasil pemilihan umum dan keputusan yang akan diambil pemerintah. Kekhasan fungsi itu juga karena kandidat yang dinominasikan memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik partai politik yang bersangkutan di depan publik (Richard S. Katz. 2001). Kandidat partai itulah yang lebih banyak menggambarkan wajah partai kepada publik dalam pemilihan umum. Karena itu partisipasi para anggota partai dalam penentuan kandidat menjadi suatu keharusan. Hazan dan Rahat juga memandang metode seleksi kandidat sebagai komponen penting dalam demokrasi partai secara internal. Pertama, kandidat merupakan salah satu aktor utama yang menentukan arah kegiatan partai politik sehingga perlu diidentifikasi posisi kekuasaan dalam partai dan bagaimana kekuasaan itu digunakan. Kedua, seleksi kandidat juga merupakan komponen utama untuk memahami evolusi berbagai model organisasi partai yang berbeda. Dan ketiga, seleksi kandidat juga mempengaruhi faktor luar partai, yaitu pilihan yang dihadapi pemilih, komposisi badan legislatif, kekompakan fraksi-fraksi di parlemen, kepentingan yang menonjol dalam perdebatan kebijakan, dan produk legislative yang dihasilkan.

Untuk memungkinkan terlaksananya pemerintahan, masyarakat harus mempercayakan hak-hak politiknya kepada para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, sementara para wakil rakyat direkrut melalui partai-partai politik yang ada dan memenuhi syarat untuk dipilih. Di sini muncul pertanyaan yang memperlihatkan suatu inkonsistensi politik. Pendapat para pengamat asing bahwa

demokrasi Indonesia mengalami perkembangan positif, partai-partai politik yang menjadi pendukung utama demokrasi tidak bisa dikatakan berada dalam perkembangan yang positif, Karena demokrasi dalam sistem politik Indonesia tidak diimbangi hidupnya internal demokrasi dalam kalangan partai politik. (<https://national.kompas.com/read/2015/04/10>).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kleden (kompas.com), dalam politik nasional seorang presiden dan wakil presiden dapat dipilih secara bebas, sementara partai-partai politik besar, seperti PDI-P atau Demokrat, masih berdebat tentang perlu tidaknya ada calon tunggal ketua umum di kongres partai mereka. Diskrepansi ini selayaknya jadi perhatian partai-partai politik dalam kaitan dengan peran mereka sebagai pilar utama demokrasi tak langsung.

Menurut Indrayana (detikNews.com) keberhasilan demokrasi di Tanah Air, salah satu kunci utamanya disumbangkan oleh bagaimana kita bisa menghadirkan parpol yang demokratis. Terlebih peran parpol sangat strategis dan vital dalam hal rekrutmen pimpinan negara, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Kegagalan kita menciptakan sistem kepartaian yang demokratis akan berdampak langsung pada kegagalan kita merawat demokrasi di Tanah Air.

*Huntington dan Diamond*, berpandangan bahwa salah satu indikator utama menuju demokrasi terkonsolidasi diperlukan kelembagaan partai politik dan pemilu sebagai esensi demokrasi. Pandangan ini sejalan dengan *Katz* yang berpendapat tentang posisi partai politik sebagai institusi paling esensial dan inti dari pemerintahan demokrasi modern. (Yuda, 2009).

Menurut Pamungkas (2011). Kualitas demokrasi sesungguhnya bergantung pada kualitas partai, keberlangsungan fungsi-fungsi partai akan menentukan wajah demokrasi. Burukwajah partai, buruk pula kualitas demokrasi, sebaliknya baik wajah partai baik pula kinerja demokrasi.

Michelis dalam “Hukum Besi Oligarki”, mengupas adanya sistem bagaimana para pelaku demokrasi atau elit-elit partai politik seperti lumpuh dan berkhianat. Hal ini disebabkan berubahnya tujuan elit partai politik dari mensejahterakan rakyat menjadi tujuannya hanya melanggengkan kekuasaannya, sehingga mereka pun sulit untuk berkomunikasi dengan massa. Dalam suatu partai, tidaklah jelas apakah kepentingan massa yang tergabung membentuk partai akan selaras dengan kepentingan-kepentingan birokrasi yang menjaga personafikasi partai tersebut (Ichlasul, 2012).

Konflik internal partai yang tak kunjung usai ikut berdampak terhadap demokrasi internal dalam tubuh partai politik. Permasalahan ini turut berimbas kepada kualitas kader partai politik yang akan dihasilkan dari parpol itu sendiri. Sehingga, penguatan internal dalam tubuh partai merupakan salah satu cara meredam konflik internal partai politik. Partai politik pada saat ini dianggap enggan untuk berbenah, karena misalkan saja Sosok pimpinan partai yang tidak berubah-ubah seolah-olah menjadikan tidak ada figur lain yang memumpuni untuk menjadi pucuk pimpinan partai. Problem ini memperlihatkan bahwa partai politik dibangun dari sistem ketergantungan pada figur-figur tertentu. Selain itu konflik internal partai yang sudah berlangsung lama akan memperparah kondisi

partai itu sendiri, serta akan membuat partai tidak produktif dan kehilangan partisipasi dalam pemilu.

Kondisi partai politik yang demikian tidak hanya akan merugikan parpol itu sendiri tetapi akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai itu. Selain itu, hubungan partai politik pusat dan daerah serta keuangan yang tidak transparan ikut menambah dan menjadi akar permasalahan terhadap demokrasi internal partai politik di Indonesia. Mengutip pendapat Skero, menurut Jati (Praktisi Ilmu Politik UGM). (Hasil FGD Pusat Studi Konstitusi/PUSaKO, FH Universitas Andalas kerjasama dengan LBH Surabaya, 13 Juni 2016). Mengatakan bahwa demokrasi internal partai terkait dengan tiga variabel dalam pengorganisasian, yaitu:

1. Persoalan sentralisasi dan desentralisasi,
2. Soal eksklusifitas, dan
3. Kelembagaan.

Kemudian demokrasi internal harus berfokus kepada lima hal yaitu partisipasi, representasi, kompetisi, responsibility dan transparan. Sedangkan menurut Aris (Praktisi Hukum Universitas Airlangga), berpendapat bahwa perlunya adanya desian khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan internal partai seperti rekrutmen, metode kaderisasi, iuran anggota serta mekanisme pemberhentian anggota partai. Selain itu beliau menegaskan bagaimana pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan anggaran partai. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut akan memberikan ruang untuk terciptanya demokrasi dalam internal partai. (pusako.or.id).

Demokrasi internal partai akan terlihat ketika kebijakan-kebijakan internal partai berdampak terhadap kebaikan politik publik sehingga arah-arrah kebijakan tersebut bukan untuk kepentingan internal partai semata, melainkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

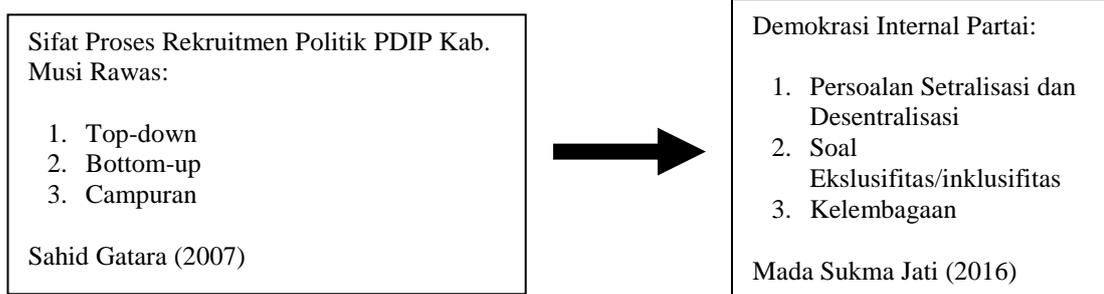
Mengacu dari berbagai permasalahan tersebut. Pengelolaan partai politik memang tidak semudah yang dibayangkan. Berbagai permasalahan di atas dapat menjadi bukti bahwa diperlukan suatu profesionalitas demi terciptanya parpol yang baik yang merepresentasikan kepentingan masyarakat. Metode yang dapat dicapai yaitu dengan kaderisasi yang baik, pembenahan internal partai serta demokrasi internal partai politik. Langkah-langkah ini dapat menjadi titik awal bagi partai politik untuk berbenah demi kesiapan dalam menghadapi pemilu atau pemilukada kedepannya.

Berbagai dinamika politik yang dirasakan masyarakat terhadap partai politik saat ini merupakan cerminan bahwa partai politik di Indonesia masih mengalami masalah serius dalam hal pelembagaannya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Mainwaring (2008) Bahwa hambatan dalam pelembagaan partai politik dapat terlihat daritiga sisi.

1. Lemahnya tingkat kompetensi antar partai secara demokratis;
2. Pelembagaan partai bermasalah pada karakter partai yang terjebak pada kepentingan individu, korupsi, prematur, terpolarisasi, mengalami kebangkrutan, dan tidak efektif;
3. Pelembagaan juga terhambat oleh struktur organisasi

Dalam demokrasi internal partai politik ini digunakan untuk mengetahui syarat-syarat proses demokratisasi dapat berjalan dengan baik di dalam internal partai. Sehingga, partai politik harus memenuhi syarat-syarat demokrasi internal yang baik disebabkan proses demokrasi di dalam partai menjadi cerminan bagi proses demokrasi di dalam sistem politik suatu negara. Semakin sesuai dengan nilai-nilai yang tepat dalam menciptakan demokratisasi internal partai maka akan semakin baik bagi peranan partai politik dalam sistem politik negara.

### 2.3. Kerangka Pikir



## **2.4. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan penjelasan secara umum terhadap konsep dari penelitian ini nantinya, sehingga akan tetap terfokuskan pada tema dari kerangka teori dan kerangka berpikir. Diantaranya sebagai berikut:

### **1. Pemilu**

Merupakan suatu sistem yang mengatur dalam proses pertarungan politik, melalui sebuah partai politik maupun kandidat politik.

### **2. Partai Politik**

Ialah suatu organisasi yang menampung kumpulan pemahaman yang bertujuan dalam suatu kekuasaan, yakni perolehan kursi maupun suara partai politik dalam Pemilu.

### **3. Demokrasi Internal Partai**

Ialah proses musyawarah secara demokratis di internal partai, yang bertujuan untuk memilih seseorang untuk dijadikan sebagai calon pimpinan partai ataupun ketua partai.

### **4. Rekrutmen Politik**

Merupakan suatu cara atau proses dalam pemilihan sampai penentuan terhadap seseorang (kandidat politik) dengan tujuan untuk ikut serta dalam pertarungan politik.

## **2.5. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan salah satu cara untuk mengukur dan mendukung dari definisi konseptual. Oleh karena itu, operasional yang peneliti gunakan adalah:

1. Sifat Proses Rekrutmen Politik PDIP Kab. Musi Rawas:
  - a) Top-down
  - b) Bootm-up
  - c) Campuran
2. Demokrasi Internal Partai:
  - a) Persoalan Sentralisasi dan Desentralisasi
  - b) Soal Eksklusifitas/inklusifitas
  - c) Kelembagaan